



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAS AGUS MARDYANTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN SARANA PRASARANA**
3. NHK : **641050**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/124 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 128 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/135 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.695.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SCORPIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.750.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.945.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 199.700.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.832.395.000

III. HUTANG Rp. 560.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.272.395.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.